

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik simpulan mengenai pelaksanaan atau operasional Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta yang diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan fasilitas Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta sudah sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2009, PMK Nomor 131/PMK.04/2018, dan Perdirjen Nomor PER-19/BC/2018. Dalam pelaksanaannya, Kawasan Berikat Mandiri berjalan dengan lancar dan tidak terdapat masalah yang menyimpang. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang berkemungkinan akan menghambat pelaksanaan Kawasan Berikat Mandiri kedepannya.
2. Berdasarkan dari hasil analisis, penulis menemukan 4 (empat) kendala yang terjadi dalam operasional Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta beserta alternatif solusinya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kendala pertama, belum adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur terkait tata laksana pelayanan mandiri secara rinci. KPPBC TMP B Yogyakarta telah melakukan kegiatan asistensi atau pendampingan kepada Kawasan Berikat yang baru ditetapkan menjadi Kawasan Berikat Mandiri dalam menyikapi kendala tersebut. Pihak Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta juga telah melakukan inisiatif dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tugas Liaison Officer (LO). Pemerintah juga disarankan agar merencanakan dan mengesahkan peraturan atau dasar hukum mengenai tata laksana pelayanan mandiri.
- b. Kendala kedua, terdapat Pengusaha Kawasan Berikat yang masih takut atau menolak ketika diberitahukan untuk menjadi Kawasan Berikat Mandiri. KPPBC TMP B Yogyakarta telah melakukan sosialisasi terus menerus kepada Kawasan Berikat yang belum menjadi Kawasan Berikat Mandiri dalam menyikapi kendala tersebut. Penulis juga memberikan alternatif solusi berupa melakukan sosialisasi atau pembuatan konten mengenai manfaat dan/atau testimoni mengenai Kawasan Berikat Mandiri dengan harapan Perusahaan Kawasan Berikat biasa akan mulai tertarik untuk menjadi Kawasan Berikat Mandiri.
- c. Kendala ketiga, sumber daya manusia pada Kawasan Berikat Mandiri tidak selalu konsisten dalam melaksanakan tugasnya.

Perusahaan harus mampu membuat Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya memiliki satu visi dan misi sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dalam menyikapi kendala tersebut. Penulis juga memberikan alternatif solusi dengan melakukan rapat atau *internal meeting* secara berkala dan memberikan instruksi kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan.